

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Pentingnya informasi laporan keuangan perbankan syariah bagi banyak pihak karena memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* sudah banyak diteliti sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Mutamimah dan Chasanah (2012) tentang analisis eksternal dan internal dalam menentukan *non performing financing* bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *non performing financing* bank umum syariah di Indonesia. Faktor penelitian yang di analisis dalam jurnal ini yaitu *Gross Domestic Product*, Inflasi, Nilai Tukar, Kebijakan jenis pembiayaan bank syariah serta rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF). Sampel yang digunakan sebanyak 3 bank umum syariah yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar mempunyai pengaruh positif terhadap *non performing financing* tetapi tidak signifikan; inflasi *sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) mempunyai pengaruh negatif terhadap *non performing financing* tetapi tidak signifikan; dan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *non performing financing*.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Auliani (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah di Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan biaya operasional pendapatan operasional, *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, sertifikat bank Indonesia syariah, inflasi dan nilai tukar sebagai variabel bebas dan rasio *non performing financing* sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini diambil dari seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dan sampel yang digunakan sebanyak 5 bank yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial BOPO dan SBIS berpengaruh positif signifikan, sedangkan CAR dan inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF. Untuk variabel FDR dan nilai tukar sebagian tidak berpengaruh terhadap NPF. Bersamaan atau bersama, variabel BOPO, CAR, FDR, SBIS, inflasi dan nilai tukar. Hasil estimasi regresi menunjukkan prediktif kemampuan model 46,5%, sedangkan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2014) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* dari bank islam di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing*. Sampel yang digunakan sebanyak 11 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing*; dan variabel *Capital Adequacy Ratio* dan efek negatif yang signifikan terhadap pembiayaan *non performing financing*; sementara variabel produk domestik bruto, inflasi dan *financing deposit ratio* tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan *non performing financing*.

Akbar (2016) dalam penelitian yang berjudul inflasi, *gross domestic product*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, *gross domestic product*, *capital adequacy ratio*, dan *financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing* pada Bank Syariah di Indonesia pada periode dari tahun 2010 sampai 2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bank syariah yang terdaftar di bank-bank di Indonesia dengan mengambil 5 sampel bank syariah. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menjelaskan pengaruh variabel tersebut, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan

model *regresi linier* berganda. Hasil penelitian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel *gross domestic product*, *capital adequacy ratio*, dan *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *non performing financing*, sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi *non performing financing* adalah inflasi. Empat variabel berpengaruh secara simultan terhadap *non performing financing*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lidyah (2016) yang melakukan penelitian tentang dampak inflasi, *BI rate*, *capital adequacy ratio*, biaya operasional pendapatan operasional terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh inflasi, *BI rate*, *capital adequacy ratio*, biaya operasional pendapatan operasional terhadap *non performing financing* Bank Syariah 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan metode *random sampling*, ada 6 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel parsial inflasi tidak mempengaruhi *non performing financing*; variabel *BI rate* secara parsial mengandung efek positif yang signifikan terhadap *non performing financing*; variabel *capital adequacy ratio* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*; variabel biaya operasional pendapatan operasional secara parsial mengandung efek positif yang signifikan terhadap *non performing financing*. Berdasarkan uji statistik F dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi, *BI Rate*, *capital adequacy ratio*, biaya operasional pendapatan operasional terhadap *non performing financing* bersama-sama, yang berarti ada pengaruh simultan antara inflasi, *BI Rate*, *non performing financing*, biaya operasional pendapatan operasional terhadap *non performing financing*.

Nursechafia dan Abduh (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *The susceptibility of islamic banks' credit risk towards macroeconomic variables*. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menilai kerentanan jangka panjang pembiayaan keberlanjutan dalam kaitannya variabel makroekonomi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan jangka panjang antara rasio risiko kredit di industri perbankan syariah dan variabel makroekonomi. Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat risiko kredit di perbankan syariah. Sementara jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nahar dan Sarker (2016) dalam judul *Are macroeconomic factors substantially influential for islamic bank financing? cross-country evidence*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor pengaruh makroekonomi terhadap bank syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi FGLS untuk menganalisis ketidakseimbangan data panel dari 172 bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto dan tingkat inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan bank syariah sedangkan nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Haniifah (2015) dengan judul *Economic Determinants of Non-performing Loans (NPLs) in Uganda Commercial Banks*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor penentu ekonomi NPL di bank komersial Uganda. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menggunakan 25 sampel bank umum di Uganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan pertumbuhan PDB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Loan (NPL)*; sedangkan nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Loan (NPL)*.

2.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko (Hakiim dan Rafsanjani, 2016:66).

Gubernur Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) mendefinisikan “CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar”.

Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yaitu sebesar 8% dari ATMR.

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan, setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal), dan faktor pengurangan (disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual). Modal ini diperhitungkan dengan faktor pengurangan berupa *goodwill*.

Sedangkan modal perlengkapan terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Aktiva yang dimaksud mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

2.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Suryani, 2011:59).

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang (Rachman, 2015:27).

FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin *illiquid* suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan.

Tingginya rasio FDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah *non performing finance* atau *Credit Risk*, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.

Namun disisi lain, rendahnya rasio FDR walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar - besarnya, dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai *financial intermediary* tidak berjalan.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85% - 100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29

Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar FDR pada tingkat 78% - 100%.

2.4 Inflasi

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Sukirno (2011:27) mengungkapkan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kelebihan permintaan terhadap sejumlah produk atau jasa dan mendorong terjadinya kenaikan harga produk secara keseluruhan.

Gubernur Bank Indonesia (2017) mengatakan bahwa “Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi”.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota (Bank Indonesia).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan “Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Sedangkan inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi

oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa”.

Rahardja dan Manurung (2016:177) mendefinikan “Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus menurut. Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

- 1) Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu sehari, seminggu, sebulan, triwulan atau bulanan.
- 2) Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
- 3) Berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

Tingkat inflasi yang tinggi biasanya diakibatkan oleh permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (*Purchasing Power of Money*). Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan riil. Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, (Rahardja dan Manurung, 2016:183), yaitu:

- 1) Inflasi Tekanan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*). Terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat (total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu). Tekanan permintaan menyebabkan output perekonomian bertambah, tetapi disertai inflasi, dimana semakin tingginya tingkat harga umum. Inflasi tekanan permintaan, tidak selalu berarti penawaran agregat tidak bertambah. Yang pasti, walaupun terjadi pertambahan penawaran agregat.
- 2) Inflasi Dorongan Biaya (*Cost-Push Inflation*). Terjadi karena kenaikan biaya produksi dan biasanya mengakibatkan penawaran agregat berkurang. Naiknya biaya produksi disebabkan naiknya harga input pokok. Misalnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan bahan bakar minyak (BBM) akan menyebabkan biaya produksi barang-barang output sektor industri menjadi lebih mahal, yang mengurangi penawaran agregat. Akhirnya tingkat harga umum akan semakin meningkat.
- 3) Stagflasi, menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagfalasi adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar nol persen per tahun. Jumlah output relatif tidak bertambah dan kondisi ini disertai inflasi. Stagfalasi akan terjadi jika permintaan agregat bertambah sedangkan penawaran agregat berkurang.

Umumnya ekonomi sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun sudah mulai mengganggu stabilitas ekonomi, lebih lagi jika yang terjadi adalah hiperinflasi (*hyper-inflation*), yaitu inflasi yang $\geq 100\%$ per tahun.

Ada beberapa masalah sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi ($\geq 10\%$ per tahun), antara lain:

- 1) Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat
Tingkat kesejahteraan masyarakat, sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin

rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Makin tinggi tingkat inflasi, makin cepat penurunan tingkat kesejahteraan.

2) Memburuknya distribusi pendapatan

Jika inflasi 20% per tahun, maka untuk menjaga stabilitas ekonomi pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Namun dalam kenyataan, hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya $\geq 20\%$ per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil tetapi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil. Distribusi pendapatan, dilihat dari pendapatan riil, makin memburuk.

3) Terganggunya stabilitas ekonomi

Produsen memproduksi pada kapasitas penuh (optimal), begitu juga konsumen memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan mereka. Kondisi nyaman ini mulai terganggu bila inflasi yang relatif tinggi telah menjadi kronis. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen perkiraan ini mendorong pembeli barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran konsumsi di masa yang akan datang. Sedangkan bagi produsen perkiraan tersebut mendorong mereka untuk menunda penjualan, untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi.

Rahardja dan Manurung (2016:185) mengatakan bahwa ada tiga indikator yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama suatu periode tertentu yaitu:

1) Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

2) Indeks Harga Perdagangan Besar

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga barang yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

3) Indeks Harga Implisit

IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataann, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapat gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan yang sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator), disingkat IHI.

2.5 Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD (Bank Indonesia).

Sukirno (2011:397) mendefinisikan “Nilai tukar (kurs) adalah satu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing”.

Kurs mata uang timbul karena adanya kegiatan ekonomi baik bilateral (antar dua Negara) maupun multilateral (lebih dari dua Negara). “Untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka mata uang - mata uang yang diperdagangkan mempunyai harga tertentu dalam mata uang Negara lain” menurut Rahardja dan Manurung (2016:99). Kurs atau nilai tukar menggambarkan beberapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lainnya. Bila dikatakan nilai tukar rupiah adalah Rp 10.000,00/US\$, maka untuk memperoleh satu unit US\$

harus disediakan sebanyak 10.000 unit rupiah. Pengertian ini dikenal sebagai nilai tukar (kurs) nominal (*nominal exchange rate*).

Banyak faktor yang menentukan nilai tukar, dan semua yang berhubungan dengan hubungan perdagangan antara kedua negara. Ingatlah mengenai nilai tukar yang relatif yang dinyatakan sebagai perbandingan dari mata uang dua negara. Berikut ini adalah beberapa faktor penentu utama nilai tukar antara dua negara.

1) Perbedaan Inflasi

Sebuah negara dengan tingkat inflasi secara konsisten lebih rendah menunjukkan kenaikan nilai mata uang, sementara daya beli relatif meningkat terhadap mata uang lainnya. Selama paruh terakhir abad ke-20, negara-negara dengan inflasi rendah meliputi Jepang, Jerman dan Swiss, dan disusul oleh Amerika Serikat dan Kanada. Negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi biasanya melihat depresiasi pada mata uang mereka dalam kaitannya dengan mata uang mitra dagang mereka. Hal ini juga biasanya disertai dengan suku bunga yang lebih tinggi.

2) Perbedaan Pada Bunga

Suku bunga, inflasi dan nilai tukar semua sangat berkorelasi. Dengan memanipulasi suku bunga, bank sentral memberikan pengaruh lebih baik pada inflasi dan nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi menarik modal asing dan menyebabkan nilai tukar naik dan suku bunga yang lebih rendah cenderung menurunkan nilai tukar.

3) *Current Account Deficits*

Current account adalah neraca perdagangan antara negara dan mitra dagangnya, mencerminkan semua pembayaran antar negara untuk barang, jasa, bunga dan dividen. *Defisit current account* menunjukkan negara ini menghabiskan lebih pada perdagangan luar negeri daripada yang produktif dan meminjam modal dari sumber luar negeri untuk juga membuat defisit. Oleh karena itu, negara membutuhkan mata uang asing lebih dari yang diterimanya melalui penjualan ekspor, dan memasok lebih sedikit mata uang sendiri dari permintaan asing untuk produk-produknya. Kelebihan permintaan untuk mata uang asing menurunkan nilai tukar negara sehingga barang dan jasa domestik cukup murah untuk orang asing, dan aset asing terlalu mahal untuk penjualan dalam kepentingan domestik.

4) Utang Publik

Negara akan terlibat dalam pembiayaan defisit besar-besaran untuk membayar proyek-proyek sektor publik dan pendanaan pemerintah. Sementara aktivitas seperti untuk merangsang ekonomi domestik, negara-negara dengan defisit publik besar dan utang kurang menarik bagi investor asing. Alasannya? Sebuah hutang yang besar mendorong inflasi, dan jika inflasi tinggi, utang akan dilayani dan akhirnya terbayar dengan dolar riil lebih murah di masa depan. Di dalam skenario terburuk, pemerintah mungkin mencetak uang untuk membayar sebagian dari hutang yang besar, tetapi meningkatkan pasokan uang pasti menyebabkan inflasi.

5) Persyaratan Perdagangan

Rasio membandingkan harga ekspor impor harga, yang dari segi perdagangan berhubungan dengan giro dan neraca pembayaran. Jika harga ekspor suatu negara meningkat dengan tingkat yang lebih besar daripada impor maka keuntungan perdagangan meningkat. Peningkatan perdagangan menunjukkan permintaan yang lebih besar untuk ekspor negara itu. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan meningkatnya pendapatan dari ekspor dan meningkatnya permintaan mata uang negara (dan peningkatan nilai mata uang). Jika harga ekspor naik dengan tingkat yang lebih kecil daripada impornya, nilai mata uang akan menurun dalam hubungannya dengan mitra dagangnya.

6) Stabilitas Politik dan Kinerja Ekonomi

Investor asing mau tidak mau mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang kuat untuk menanamkan modalnya. Sebuah negara dengan atribut positif seperti itu akan menarik dana investasi dari negara-negara lain karena dianggap memiliki risiko lebih kecil mengenai politik dan ekonomi. Kekacauan politik, misalnya, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terkait mata uang dan pergerakan modal untuk mata uang dari negara-negara yang lebih stabil.

Rahardja dan Manurung (2016:74-76), mengatakan bahwa terdapat dua mekanisme penentuan nilai tukar yaitu mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Jika nilai tukar mata uang suatu negara ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, maka negara tersebut dikatakan menganut sistem nilai tukar (kurs) mengambang (*floating*

exchange rate), bila nilai tukarnya ditetapkan pemerintah, maka negara tersebut menganut nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*).

1) Sistem nilai tukar mengambang

Harga mata uang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran). Pergerakan nilai tukar semata-mata ditentukan oleh pergerakan sisi permintaan dan penawaran. Bila pertumbuhan permintaan lebih cepat dari pertumbuhan penawarannya maka mata uang tersebut akan semakin mahal (mengalami apresiasi). Bila nilai tukarnya melemah (mengalami depresiasi) maka artinya pertumbuhan permintaan lebih lambat dari pertumbuhan penawaran.

2) Sistem nilai tukar tetap

Kurs ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Kelebihannya adalah kepastian nilai tukar yang dapat meningkatkan ekspektasi. Kelemahannya adalah kurs yang berlaku tidak selalu menggambarkan tingkat kelangkaan yang semestinya. Bisa terjadi nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi disbanding dengan kurs pasar (*overvalued*). Atau sebaliknya nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah disbanding dengan kurs pasar (*undervalued*). Bila selisih kurs yang ditetapkan dianggap terlalu jauh, maka pemerintah melakukan koreksi. Koreksi atas nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi disebut devaluasi, sedangkan koreksi untuk nilai tukar yang dinilai terlalu rendah disebut revaluasi. Selain itu terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pemerintah, antara lain :

(1) *Fixed exchange rate system*

Sistem nilai tukar yang ditahan secara bertahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar berubah terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya dalam batas-batas yang dikehendaki.

(2) *Freely floating exchange rate sytem*

Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari pemerintah.

(3) *Managed floating exchange rate system*

Sistem dimana pemerintah dapat mengatur perubahan nilai tukar tanpa bermaksud untuk membuat nilai tukar dalam kondisi tetap.

(4) *Pegged exchange rate system*

Sistem nilai tukar dimana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing.

2.6 *Non Performing Financing*

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasioanalnya juga tidak lepas dari berbagai resiko yang mungkin timbul, dan dalam meminimalisir resiko setiap bank syariah menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mamantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan-kegiatan usaha bank. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu (Wangsawidjaja, 2012:86). Resiko yang dihadapi bank syariah adalah resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hokum, resiko reputasi, resiko strategic, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil dan resiko investasi.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intrepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Simatupang dan Franzlay, 2016:469).

Surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs Tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. *Non Performing Financing* adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena sebagai sebab, tidap dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan.

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Kasmir (2014:109) mengatakan *non performing financing* disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1) Pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisi kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif

2) Pihak nasabah

Pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- (1) Adanya unsur kesenjangan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- (2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kabanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dapat mendatangkan dampak yang kurang baik bagi penyalur dana, dunia perbankan maupun terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Dampak- dampak dari pembiayaan tersebut menurut Mahmoedin (2010:111) antara lain:

1) Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan

Bank yang dipicu masalah pembiayaan macet dalam jumlah besar akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas memengaruhi profitabilitas yang menjadi kinerja keuangan suatu perbankan.

2) Dampak terhadap dunia perbankan

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan kualitas pembiayaan dan kinerja keuangan terhadap aset sudah sangat parah maka kepercayaan pada penitip dana terhadap bank akan menurun.

3) Dampak terhadap ekonomi dan moneter Negara

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan macet akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain

karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.

Kasmir (2014:110) mengatakan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja sejumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini.

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga. Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit

tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah *equity* seperti dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik

4) Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.7 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan empat variabel independen yaitu inflasi, nilai tukar, *capital adequacy ratio*, dan *financing deposit ratio*.

Pertama, mengidentifikasi hubungan antara *capital adequacy ratio* terhadap *non performing financing*. *Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2014:46). Tingkat *Capital Adequacy Ratio* akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga bank bisa memenuhi kecukupan dana untuk melakukan kegiatan operasionalnya (Simatupang dan Franzlay, 2016:469). Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 30 Oktober 2008, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements*. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin

rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Rachman, 2015:31).

Kedua, mengidentifikasi hubungan antara *financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Suryani, 2011:56). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat (Rachman, 2015:29).

Ketiga, mengidentifikasi hubungan antara inflasi terhadap *non performing financing*. Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun (Mutamimah dan Chasanah, 2012:52). Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan *return* perusahaan. Penurunan *return* yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet, sehingga meningkat angka *non performing financing* (Asnaini, 2014:270).

Keempat, mengidentifikasi hubungan antara nilai tukar terhadap *non performing financing*. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah menyebabkan perusahaan atau rumah tangga produksi yang mendapatkan bahan baku produksinya dari luar negeri akan

mengalami penambahan biaya untuk membeli. Hal ini dikarenakan biaya bahan baku semakin mahal dan mengurangi keuntungan perusahaan atau rumah tangga dan menambah risiko atas pengembalian pembiayaan kepada perbankan. Dikarenakan pendapatan yang diterima perusahaan dan rumah tangga produksi semakin kecil atau bahkan bisa mengalami defisit dikarenakan harga bahan baku yang semakin mahal dan tidak mampu mengantisipasi. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya nilai tukar/kurs rupiah terhadap mata uang asing akan meningkatkan rasio NPF (Firdaus, 2015:90).

2.8 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang sudah disajikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

Capital Adequacy Rasio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko (Hakiim dan Rafsanjani, 2016:67). Tingkat *Capital Adequacy Ratio* akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga bank bisa memenuhi kecukupan dana untuk melakukan kegiatan operasionalnya (Simatupang dan Franzlay, 2016:469). CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 (Hakiim dan Rafsanjani, 2016:67).

Hasil penelitian yang dilakukan Akbar (2016:33) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*. Dalam penelitian yang dilakukan Lidyah (2016:15) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*. Hasil penelitian yang dilakukan Hasanah (2016:284) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *Capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.

2.8.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah likuiditasnya (Auliani, 2016:4). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula dana pihak ketiga yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Di sisi lain FDR yang terlampaui tinggi dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank (Popita, 2013:407). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan variabel yang memberikan kontribusi yang besar terhadap *non performing financing* perbankan syariah. Hal ini dikarenakan *financing to deposit ratio* perbankan syariah sangatlah tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 100%. Tingkat *financing to deposit ratio* yang sangat tinggi tertentu tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat *non performing financing* perbankan syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan Akbar (2016:33) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian yang dilakukan Hasanah (2017:284) menunjukkan bahwa *Financing Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *non performing financing*. Peneliti lain yang sama yang dilakukan Firmansari (2015:518) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *non performing financing*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap *non performing financing*.

2.8.3 Pengaruh Inflasi Terhadap *Non Performing Financing*

Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu yang dikutip dalam (Mutamimah dan Chasanah: 2012:53). Dengan meningkatnya inflasi maka akan mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kreditnya juga akan terganggu. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun (Lidyah, 2016:6). Auliani (2016:4) mengatakan hubungan yang terjadi antara inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Inflasi akan membawa dampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan dan individu. Melambungnya harga membuat daya beli masyarakat berkurang dan pendapatan yang diterima dari penjualan produk dan jasa akan semakin menurun. Modal yang didapat dari pembiayaan akan mengalami masalah dalam pengembalian kepada pihak bank. Hal ini akan menyebabkan tingkat NPF semakin tinggi pada perbankan (Firdaus, 2015:90).

Penelitian yang dilakukan Auliani (2016:11) inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *non performing financing* di bank umum syariah. Penelitian yang sama yang dilakukan Firmansari (2015:518) inflasi secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Purnamasari dan Musdhilifah (2016:434) inflasi secara simultan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan NPF. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Inflasi berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.

2.8.4 Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap *Non Performing Financing*

Nilai tukar (kurs) adalah satu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Sukirno, 2011:397). Hasil riset BI menunjukkan bahwa jika suatu Negara memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing dalam jumlah besar, baik itu dilakukan oleh bank, lembaga keuangan, ataupun nasabah bank maka kondisi tersebut telah menyebabkan sistem keuangan secara keseluruhan rentan terhadap gejolak nilai tukar. Penurunan nilai tukar

terhadap valuta asing menyebabkan pinjaman dalam mata uang asing meningkat nilainya secara relatif sesuai dengan penurunan tersebut. Perubahan nilai tukar rupiah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap debitur bank yaitu dengan asumsi tidak dilakukan *hedging* untuk debitur yang bergerak dalam bidang eksportir, penguatan mata uang rupiah terhadap mata uang asing lain akan mengurangi pendapatannya, namun untuk debitur yang bergerak dalam bidang importir hal sebaliknya yang akan terjadi yaitu penguatan mata uang rupiah akan menambah pendapatannya. Perbedaan tersebut menyebabkan pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap kinerja debitur akan berbeda-beda sehingga pengaruhnya terhadap NPL juga akan berbeda (Mutamimah dan Chasanah, 2012:55).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Mutamimah dan Chasanah (2012:60) dapat dilihat bahwa nilai tukar (*kurs*) memiliki pengaruh positif terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian Haniifah (2015:146) nilai tukar berpengaruh positif terhadap *non performing financing*. Hasil penelitian yang dilakukan Purnamasari dan Musdholifah (2016:434) menunjukkan bahwa nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap *non performing financing*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Nilai tukar berpengaruh positif terhadap *non performing financing*.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah dalam suatu bank syariah. Hal ini menjadikan faktor-faktor tersebut menjadi variabel independen yang akan diteliti hubungannya dengan pengungkapan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, inflasi dan nilai tukar. Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing*. Berikut ini dapat dijelaskan secara singkat dengan kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian